

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. V, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan
Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta

Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta

Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia
Indonesia, Bogor

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta

Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*,
Buku Kompas, Jakarta

Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Umpa Press, Jakarta

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Cevia, Bandung



Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

H. Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

H. Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang

Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung

Lukman Surya Saputra, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Setia Purna Inves, Bandung

M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
(Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, PT.
Rineka Cipta, Jakarta

Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan
Umum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,
Mataram

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di
Indonesia Pasca Reformasi*, Kanisius, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group,
Jakarta



Pradhita Rika Nagara, 2014, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

R. Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 13, PT.

Pradnya Paramita, Jakarta

Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

Samuel P. Huntington, 2003, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta



Syamsuddin Haris, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan

Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

T. May Rudy, 2003, *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan*

Kegunaannya), Refika Aditama, Edisi Revisi, Bandung

Victor Osmond Tarigan, 2016, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan*

di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,*

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. VIII, Sinar

Grafika, Jakarta

_____, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

SEMA Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemeriksaan Pengadilan dan Pengucapan Putusan Harus Dilakukan Dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

C. Jurnal

Abdul Kahar Muzakkir dkk, 2021, Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Pleno Jure, Vol. 10, No.1

Qonita Dina Latansa, 2019, Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Jurist-Diction, Vol. 2, No. 2

D. Internet

Humas Setkab RI, *Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)*, setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017

<https://katadata.co.id/ira/berita/6402d7dc12089/duduk-perkara-gugatan-partai-prima-diterima-bawaslu-ditolak-ptun>

Rico Afrido Simanjuntak. *“Jangan Zalimi Rakyat! Ini Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024”*. <https://nasional.sindonews.com/read/699541/12/jangan-zalimi-rakyat-ini-dampak-buruk-penundaan-pemilu-2024-1646082210?showpage=all>

Willa Wahyuni, *“Sejumlah Dampak Jika Pemilu 2024 Ditunda”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-dampak-jika-pemilu-2024-ditunda-lt64070d6731cd5/>

